



Kliping Digital

Agama dan Keagamaan

Jumat, 19 Juni 2020



**PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA**



Uang Jemaah Dijamin

Pemerintah menjamin hak-hak jemaah calon haji pascapembatalan keberangkatan haji tahun ini. Dibuka kesempatan bagi jemaah yang ingin menarik kembali setoran pelunasan biaya haji.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Agama menjamin pengembalian uang jemaah calon haji yang batal berangkat tahun 2020. Setoran pelunasan uang jemaah akan dikembalikan berdasarkan pengajuan yang dilakukan setiap anggota jemaah ke perwakilan Kementerian Agama yang berada di daerah.

Jaminan pengembalian uang jemaah haji itu mengemuka dalam rapat kerja antara Menteri Agama Fachrul Razi dan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Pada 2 Juni 2020, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 dengan pertimbangan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia ataupun di Arab Saudi.

Sebagai konsekuensi atas pembatalan itu, Fachrul mengatakan, pihaknya menjamin pengembalian dana bagi jemaah calon haji yang ingin menarik kembali setoran pelunasannya. Jemaah yang sudah melunasi

biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dapat menarik kembali setoran pelunasannya melalui kantor Kemenag yang ada di kabupaten/kota. Pengembalian setoran pelunasan itu telah dibuka sejak 3 Juni 2020.

"Selanjutnya permintaan itu akan diproses ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan bank penerima setoran (BPS). Setelah mendapat surat perintah membayar (SPM) dari BPKH, BPS akan mentransfer dananya ke rekening jemaah. Secara prosedur, proses ini berlangsung sembilan hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh kantor Kemenag kabupaten atau kota," paparnya.

Berdasarkan data Kemenag, hingga 29 Mei 2020, sebanyak 198.765 orang jemaah haji reguler dan 15.467 orang jemaah haji khusus telah melunasi BPIH. Dari jumlah tersebut, hingga 16 Juni 2020, jemaah yang mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan ada 359 orang.

Adapun bagi jemaah yang tidak mengajukan pengembalian, pemerintah akan mengatur kembali pemberangkatan mereka pada tahun berikutnya.

Terkait hal itu, sejumlah anggota Komisi VIII DPR meminta agar pemerintah tidak mempersulit mereka yang ingin menarik kembali setoran pelunasan BPIH. Kesiapan jajaran Kemenag di daerah pun harus dipastikan agar tidak menuai kekecewaan di kemudian hari.

"Ada jangka waktu 9 hari bagi BPKH untuk memberi perintah bayar. Tolong dicek lagi kesiapan teman-teman (Kemenag) di daerah dalam merespons sistem ini. Sebab, kalau ada ketidaksesuaian, akan ada lagi keributan. Nanti jangan sampai ada pemotongan BPIH yang dikembalikan," tutur Diah Pitaloka, anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah segera membuat daftar keberangkatan bagi jemaah calon haji yang berangkat tahun 2021. Sebab, pembatalan keberangkatan haji akan berim-

pikasi pada makin panjangnya daftar antrean jemaah haji pada tahun-tahun berikutnya.

Pembatalan sepihak

Dalam rapat, Komisi VIII juga mengkritik pemerintah yang tidak melibatkan DPR dalam keputusan pembatalan keberangkatan haji.

Menurut anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar, John Kenedy Azis, sikap pemerintah itu seolah tidak menganggap penting DPR sebagai representasi rakyat.

Adapun anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori, menilai, selain tidak tepat secara hukum, keputusan pembatalan haji dinilai cacat secara etika dan moral hukum. Karena itu, ada konsekuensi hukum yang harus disikapi kementerian.

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menambahkan, pembatalan keberangkatan haji tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena ketentuan itu hanya dilakukan melalui keputusan

menteri agama (KMA).

"BPIH saja harus ditentukan dalam keputusan presiden (keppres) dan persiapannya dibahas DPR dengan panja Kemenag. Kok, ini urusan 221.000 orang jemaah haji hanya melalui KMA," katanya.

Terkait hal itu, Fachrul meminta maaf. Keputusan pembatalan diambil karena pemerintah menilai tidak lagi cukup waktu untuk memberangkatkan jemaah calon haji. Sebab, hingga 1 Juni 2020 yang bagi pemerintah menjadi batas waktu kepastian pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini, belum ada jawaban dari Pemerintah Arab Saudi apakah ibadah haji dapat diselenggarakan atau tidak di tengah pandemi.

"Ini keputusan yang pahit dan sulit. Namun, kami juga memikul tanggung jawab untuk keselamatan jemaah dan petugas haji. Risiko keselamatan dan kemanusiaan jadi prioritas pertimbangan kami. Kami tetap menjamin hak-hak jemaah dan petugas dipenuhi sesuai dengan ketentuan," katanya. (REK)



Peleburan Mapel Agama dengan PPKN Ditolak

Di antara tujuan pendidikan nasional seperti diamanatkan undang-undang ialah mengembangkan potensi peserta didik yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan akhlak.

SYARIEF OEBAILLHAH
oebay@mediaindonesia.com

TIM Kurikulum dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah mengkaji tentang penyederhanaan Kurikulum 2013 (K-13). Salah satu meteri yang dibahas terkait struktur kurikulum SD dan menjadi perbincangan ramai sejumlah kalangan juga para guru yakni penggabungan mata pelajaran (mapel)

agama dengan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKN).

Dalam menanggapi wacana yang tengah berkembang tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan tidak setuju dengan adanya penyatuan mata pelajaran tersebut. "Saya tidak setuju 1.000x. Apa alasannya untuk menyatukan mata pelajaran tersebut?" tanya Anwar Abbas, kemarin.

Kalau memang benar hal itu direncanakan, Anwar Abbas menilai telah terjadi

upaya pendangkalan agama dan sekulerisasi. "Saya ulangi sekali lagi, kalau memang ada, berarti pendangkalan agama dan sekulerisasi itu benar-benar mereka lakukan secara nyata dan sistematis. Jika mereka berani melakukannya, silakan saja. Sama-sama kita lihat," kata Anwar Abbas yang juga Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu.

Hal senada ditegaskan Pimpinan Lembaga Pendidikan Maarif PBNU KH Arifin Ju-naedi yang juga tegas menolak peleburan mapel pendidikan agama dengan PPKN, Pancasila, dan Kepercayaan itu.

"Kami sudah membicarakannya dan akan segera menyikapinya. Memang masih internal, tetapi intinya kami menolak," tandas Arifin Ju-

naedi. Menurutnya, materi pendidikan agama yang ada sebenarnya masih kurang. "Lah kok sekarang malah mau dikurangi dengan rencana peleburan tersebut," tegasnya.

Cetak biru

Praktisi pendidikan Indra Charismiadji mengaku telah melihat desain perubahan Kurikulum 2013 tersebut. Dia berharap mapel agama tetap berdiri sendiri, tidak dilebur.

Hemat dia, Kemendikbud sebaiknya membuat cetak biru (*blue print*) pendidikan terlebih dulu baru pergantian kurikulum di dalamnya. "Kita butuh tahu tujuannya apa, urgensinya apa, targetnya apa. Jangan cuma menghabiskan uang rakyat, namun tidak ada peningkatan mutu sama

sekali," tandas Indra seraya mengingatkan jangan terjadi stigma ganti menteri, ganti kurikulum, walau menterinya milenial.

Terpisah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, Totok Suprayitno menepis pandangan adanya rencana Kemendikbud melebur mata pelajaran agama ke mapel PPKN.

"Enggak, kok. Itu hanya bahan diskusi awal saja di antara tim kerja kurikulum. Diskusi masih terus berlangsung dan laporan terakhir yang saya terima, konstruksi kelompok mata pelajarannya tidak seperti itu. Saat ini belum ada keputusan apa pun dari kementerian tentang perubahan kurikulum seperti apa," kata Totok menjawab *Media Indonesia* tadi malam.

Menurut Totok, diskusi masih berjalan dinamis. "Tentu kami mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan. Saat ini belum ada keputusan apa pun. Kami juga melibatkan berbagai tokoh akademisi dan tokoh agama dalam membahasnya," pungkask Totok. (H-1)



Perkuat Ekonomi Pesantren

Tak sedikit dari lembaga filantropi yang menjadi anggota Foz berbasis pesantren

■ IMAS DAMAYANTI

Dampak pandemi virus korona jenis baru (Covid-19) sangat luas, termasuk ke dunia pesantren. Agar dunia pesantren dapat bergerak lebih mandiri, lembaga-lembaga filantropi Islam membidik penguatan ekonomi pesantren.

Ketua Umum Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LazisNU) Achmad Sudrajat mengatakan, penguatan ekonomi pesantren menjadi hal penting yang harus

dilakukan guna membangkitkan kembali spirit ekonomi dari dampak Covid-19. Dia menjelaskan, meski pesantren di Indonesia dikenal memiliki karakteristik mandiri, perlu diakui bahwa sejumlah pesantren memiliki kemampuan ekonomi yang lemah. "Ada dari pesantren-pesantren itu yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Kita juga fokus bantu ini," kata Achmad saat dihubungi *Republika*, belum lama ini.

Dia menjelaskan, dalam menanggulangi dampak Covid-19, LazisNU menggerakkan penguatan jejaring untuk membantu penguatan ekonomi pesantren. Misalnya,

kata dia, melalui Rabithah Al-Ma'ahid Al-Islamiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU) yang membidangi pondok pesantren di bawah naungan NU. "Kita berkolaborasi dengan mereka, dengan lembaga-lembaga lain juga seperti Ma'arif dan RMI. Itu yang kita lakukan," kata dia.

Selain penguatan ekonomi pesantren, LazisNU juga terus berupaya memberikan beasiswa kepada para santri dan mahasiswa-mahasiswa NU yang berprestasi. Dia berharap, dengan hadirnya aksi dari lembaga filantropi Islam, seperti LazisNU ini, sektor pesantren dapat lebih maju dan terus dapat menanggulangi Covid-19.

Berdasarkan catatan Forum Zakat (Foz), terdapat 82 organisasi pengelola zakat (OPZ) yang ikut serta melakukan penanganan Covid-19 di 33 provinsi. Penang-

gulan Covid-19 dilakukan dengan membentuk tiga klaster koordinasi, antara lain klaster sosial ekonomi terdampak, pencegahan dan pengadaan alat pelindung diri (APD), dan penanganan ODP, PDP, dan pemulasaran jenazah.

Sekretaris Jenderal Foz Nana Sudiana menyampaikan, dari klaster sosial ekonomi terdampak terdapat program bantuan yang dialokasikan untuk membantu penguatan ekonomi pesantren. Lembaga filantropi, kata dia, bergerak secara beragam dalam memberikan penguatan tersebut. "Jadi, lembaga filantropi ini bergerak secara luas (dalam penguatan ekonomi)," kata dia.

Program penguatan ekonomi pesantren menurut dia menjadi salah satu program yang menjadi fokus OPZ. Sebab, tak sedikit dari lembaga filantropi yang menjadi anggota Foz, seperti Hidayatullah, Panti Yatim, Rumah Zakat, dan lain sebagainya berbasis pesantren. Sehingga program penguatan ekonomi pesantren akibat Covid-19 pun terus digencarkan. Pergerakan lembaga filantropi dalam penguatan ekonomi pun luas. Lembaga-lembaga filantropi umumnya menasar tingkat konsumsi kebutuhan dasar, membantu mengarahkan ketahanan pangan, membantu aktivitas ekonomi yang dilakukan pesantren, hingga membantu memasarkan produk-produk yang dihasilkan pesantren.

"Filantropi ada yang bantu je-

jaringnya, bantu pendampingan, pemasaran, dan lain-lain," ujar dia.

Nana pun mengungkapkan, sejumlah pesantren yang telah disiapkan penguatan ekonominya oleh lembaga-lembaga filantropi memang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Meski demikian, tak sedikit pula program penguatan ekonomi yang menasar ke pesantren-pesantren di luar Pulau Jawa. "Seperti Hidayatullah, mereka fokusnya di Balikpapan," kata dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kini terdapat sejumlah pesantren yang telah mampu menyiapkan ketahanan pangannya sendiri mulai beras, telur, hingga ayam. Hal itu terjadi karena adanya pengelolaan sumber daya yang ada dengan program-program yang dikolaborasi bersama OPZ.

Dia pun menggarisbawahi, setiap pesantren memiliki karakteristik yang berbeda. Program penguatan ekonomi yang dijalankan di tiap-tiap pesantren pun akan menghasilkan output yang berbeda pula. Menjelang reaktivasi pesantren, Nana mengatakan, terdapat sejumlah pesantren yang sudah berancang-ancang menjalankan penguatan ekonominya kembali.

■ edia: syalaby ichsan

**“
Kita berkolaborasi dengan mereka, dengan lembaga-lembaga lain juga seperti Ma'arif dan RMI. Itu yang kita lakukan.”**



Wisata Halal Masih Berpotensi Melejit

■ RETNO WULANDHARI

JAKARTA — Pasar wisata halal dinilai masih potensial untuk digarap setelah pandemi Covid-19 berlalu. Pertumbuhan wisatawan Muslim baik dari pariwisata domestik maupun internasional diprediksi tetap tinggi hingga 2024 nanti.

“(Wisatawan) Muslim itu pasar yang bisa digarap setelah pandemi,” kata Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Riyanto Sofyan dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (18/6).

Menurut Riyanto, perjalanan wisatawan Muslim domestik berpotensi tumbuh 5,8 persen atau naik mencapai 352,8 juta kunjungan pada 2024. Sedangkan, kedatangan wisatawan Muslim internasional ke dalam negeri bisa mencapai 24 juta kunjungan atau tumbuh 7,5 persen.

Peningkatan kedatangan wisatawan Muslim internasional diprediksi akan turut mendorong pertumbuhan penerimaan devisa sebesar 8,2 miliar dolar AS atau naik 12,2 persen. Sementara itu, pengeluaran wisatawan Muslim domestik diprediksi mencapai 21,2 miliar dolar AS atau naik 5,5 persen.

Riyanto melihat, konsep wisata halal sangat cocok diterapkan pada era kenormalan baru atau *new normal*. Menurutnya, wisata halal memiliki karakter yang tidak terlalu jauh berbeda dengan *new normal* pariwisata.

“Secara garis besar keduanya sama-sama mengutamakan aspek keamanan, kenyamanan, serta ramah untuk kalangan keluarga,” kata Riyanto.

Selain itu, Riyanto menilai, pariwisata halal memiliki peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Pasalnya, tren dan gaya hidup halal sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Menurut Riyanto, ini juga sebagai salah satu cara memperluas jangkauan pasar.

Meski demikian, Riyanto mengakui, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan sektor wisata di era *new normal* nanti. Di antaranya, yaitu keterbatasan fasilitas kesehatan obat-obatan dan pencegahan Covid-19, berkurangnya daya beli masyarakat, serta

kemungkinan periode pandemi yang lebih lama.

Di sisi lain, lanjut Riyanto, program stimulus ekonomi dari pemerintah dalam penanganan Covid-19 bagi pelaku usaha sektor pariwisata juga sangat minim. Hal tersebut ditambah dengan anggaran pemerintah yang cukup terbatas untuk pariwisata.

“Di negara lain pelaku wisata halal sangat terbuka dan didukung oleh pemerintah. Mereka melihat wisata halal sebagai sebuah potensi. Kami butuh didukung dengan hal yang sama seperti varian produk wisata lainnya,” tutur Riyanto.

Pariwisata merupakan sektor yang terpukul kuat akibat pandemi Covid-19. Penurunan kunjungan wisman pada April 2020 sebesar 87,44 persen (yoy). Jumlah hotel dan restoran yang berhenti menjalankan usahanya, secara berurutan mencapai lebih dari 2.000 dan lebih dari 8.000.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melihat sektor pariwisata Indonesia masih memiliki peluang yang besar untuk tetap bergeliat di era *new normal*. Pariwisata Indonesia dinilai masih bisa bertumbuh.

“Berbeda dengan Thailand, Singapura, dan Malaysia, ketergantungan Indonesia pada wisatawan mancanegara tidak setinggi mereka,” kata Deputy Bidang Kebijakan Strategis, Kemenparekraf R Kurleni Ukur. ■ ed:ahmad fikri noor



MUI: Hentikan Perdebatan RUU HIP

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi serta menghargai sikap dan langkah tegas pemerintah untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mengembalikan RUU tersebut kepada DPR sebagai pengusul. Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi dalam siaran pers, Kamis (18/6/2020), mengatakan, dengan dikembalikannya RUU HIP kepada DPR, MUI mengajak semua elemen masyarakat untuk menghentikan segala silang sengketa dan kegaduhan di ruang publik terkait RUU HIP. "Kita konsentrasikan pikiran dan perhatian kepada DPR untuk membangun komunikasi dan dialog secara konstruktif serta persuasif agar ditemukan solusi lebih maslahat untuk kepentingan umat dan bangsa," ujarnya. (REK)



MUI: Shalat Jumat Ganjil-Genap, Itu Alternatif

DMI berharap *physical distancing* lebih efektif dengan shalat Jumat dua gelombang.

■ FUJI E PERMANA,
ANDRIAN SAPUTRA

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi surat edaran Dewan Masjid Indonesia (DMI) tentang tata cara shalat Jumat dua gelombang dengan aturan ganjil-genap yang didasarkan pada nomor telepon seluler (ponsel) jamaah.

"Menurut saya, surat edaran DMI hanya bagian dari alternatif, bisa saja *Jumatan* (shalat Jumat) di beberapa tempat atau kalau tidak memungkinkan, ya, shalat *Zhuhur*," kata Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI KH Muhammad Cholil Nafis kepada *Republika*, Kamis (18/6).

Ia menerangkan, pada dasarnya, shalat Jumat hanya dilakukan sekali di satu tempat. Karena banyaknya penduduk, maka shalat Jumat bisa digelar di beberapa tempat di satu daerah.

Di saat pandemi Covid-19 ini, kata Kiai Cholil, umat Islam bisa shalat Jumat tapi harus menjaga jarak fisik.

Namun, ketika tempat untuk shalat Jumat tidak mencukupi, maka bisa diselenggarakan shalat Jumat di beberapa tempat.

"Ada pendapat membuat dua gelombang (shalat Jumat). Ya, bisa, itu di antara pendapat ulama diperbolehkan," ujar Juru

Bicara Satgas Covid-19 MUI ini. "Bisa juga umat Islam shalat *Zhuhur* kalau tidak ada shalat Jumat atau tidak memungkinkan ikut shalat Jumat dalam satu tempat itu," lanjut dia.

Karena itu, ia menilai surat edaran DMI tersebut hanya bagian dari alternatif saja, yakni berdasarkan ganjil-genap nomor ponsel jamaah.

Namun, ia memperkirakan, hal ini dalam praktiknya akan sulit. Sebab, pada umumnya orang memiliki ponsel lebih dari satu.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Sekretaris Jenderal DMI Imam Addaruquthni menjelaskan, Surat Edaran Nomor 105-Khusus/PP-DMI/A/VI/2020 yang terbit pada Selasa (16/6) dan ditanandatangani Ketua Umum DMI M Jusuf Kalla tersebut dibuat karena dilatarbelakangi keprihatinan pada pelaksanaan shalat Jumat dalam dua pekan terakhir.

Menurut dia, banyak masjid yang tidak bisa menampung jamaah hingga sebagian jamaah pun meluber ke jalan umum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran adanya risiko paparan Covid-19 yang dihadapi jamaah karena melaksanakan shalat di tempat yang tidak steril.

Meski demikian, menurut Imam, surat edaran tersebut sebatas memberikan alternatif cara

yang bisa diterapkan para pengurus masjid yang mengalami kendala dalam menyelenggarakan shalat Jumat karena membeludaknya jamaah.

"Patungnya sudah ada, orang tak usah ragu lagi soal pelaksanaan shalat dua gelombang. Sekarang pengaturannya kita serahkan kepada masjid masing-masing. Tapi, untuk membantu itu bisa dikembangkan nomor ganjil genap dari HP jamaah," ujar Imam.

Imam pun menjelaskan teknis pelaksanaan shalat Jumat dua gelombang dengan aturan ganjil-genap dari nomor ponsel jamaah.

Jamaah bisa mendaftarkan nomor ponselnya kepada petugas masjid. Pada tanggal ganjil, shalat Jumat untuk gelombang pertama diikuti jamaah dengan nomor ponsel akhir ganjil.

Sedangkan, jamaah dengan nomor ponsel akhir genap bisa mengikuti shalat Jumat gelombang kedua. Begitu pun sebaliknya pada tanggal genap.

Dengan cara seperti itu, menurut Imam, penerapan *physical distancing* menjadi lebih efektif. "Ini soal bagaimana mempertimbangkan keselamatan orang banyak. Jangan ambil risiko dengan mengorbankan jamaah menempati jalan-jalan," katanya.

Sementara, beberapa masjid di Jakarta, di antaranya Masjid Agung Al-Azhar dan Masjid Agung Sunda Kelapa, memutuskan untuk tetap menyelenggarakan shalat Jumat dalam satu waktu atau tanpa gelombang.

■ *des alvi soraya ed: wachidah handasah*



MUSLIM BERGERAK LAWAN RASIALISME

Sembilan puluh organisasi komunitas muslim bersatu menuntut reformasi kepolisian di Amerika.

■ ANDRIAN SAPUTRA

Gelombang demonstrasi pascakematian pria Afro-Amerika, George Floyd, di tangan polisi kulit putih, Derek Chauvin, terus terjadi. Demonstrasi besar-besaran tak hanya berlangsung di berbagai negara bagian Amerika Serikat, tetapi juga di Amerika Latin hingga Eropa. Lebih dari itu, demonstrasi yang juga bertujuan menolak rasialisme itu telah memantik semangat umat Islam di Negeri Paman Sam untuk turut serta bergabung dalam barisan demonstran.

Pada Sabtu (13/6) lalu, umat Islam juga berbondong-bondong berkumpul di Balai Kota Newark, New Jersey, untuk turut mengancam kebrutalan polisi Amerika atas kematian Floyd yang mencerminkan rasialisme. Seperti dilansir *NJ.com*, dalam aksi itu, Dewan Keadilan Sosial, Lingkaran Islam Amerika Utara (ICNA) Cabang New Jersey, menyerukan perlunya reformasi di tubuh kepolisian Amerika. Mereka meminta adanya pelatihan agar polisi lebih peka terhadap rasialisme.

ICNA juga membuat petisi daring menuntut dakwaan pembunuhan dijatuhkan kepada

keempat polisi. Saat ini, hanya Derek Chauvin yang menghadapi tuntutan pembunuhan tingkat dua. Aksi yang dilakukan umat Islam di New Jersey itu pun mendapat sambutan hangat dari dewan lokal, wali kota, serta para pemuka agama lain yang juga turut mengikuti jalannya aksi itu.

"Kita semua berkumpul di sini untuk menyuatkan solidaritas untuk saudara-saudara kita komunitas Afrika-Amerika, dan kami menugut kematian George Floyd di Minnesota. Kebrutalan polisi adalah masalah yang sudah berlangsung lama di negeri ini dan Floyd adalah korban kekejaman ini," kata Direktur ICNA Atif Nazir.

Lain lagi dengan cara protes yang berlangsung di Kota Milwaukee, Negara Bagian Wisconsin, Amerika Serikat. Para seniman lokal membuat mural bertajuk Muslim untuk Kulit Hitam. Aksi membuat mural itu berlangsung di sepanjang jalan Utara Avenue dan jalan Utara Holton. Seperti dilansir Milwaukee Journal Sentinel, aksi membuat mural itu berlangsung pada Ahad (14/6). Aksi itu digagas kelompok seni Muslim Milwaukee yang diketuai Amal Azam dan Nayfa Naji. Keduanya bekerja sama dengan seniman lokal untuk membuat mural dengan disertai pesan Black Lives



Kewajiban kami sebagai Muslim untuk menentang ketidakadilan sistemik yang berkontribusi terhadap penderitaan ini.

Matter serta tulisan "Our Kids Will Not Be Next". Itu dibuat sebagai respons atas kematian Floyd.

Azzam berharap aksi pembuatan mural itu dapat menyampaikan pesan persatuan, khususnya di Kota Milwaukee yang sudah lama dipecah oleh pemisahan ras dan etnis secara paksa. Sedangkan, rekannya, Naji, berharap protes dan gerakan menentang rasialisme yang berlangsung baru-baru ini dapat membawa perubahan.

Dilansir dari *Aljazeera*, sebanyak 90 organisasi komunitas Muslim bersatu menuntut reformasi kepolisian di Amerika. Selain itu, mereka juga mendukung organisasi-organisasi yang dipimpin warga kulit hitam Amerika Serikat. Dilansir *5Pillars*, koalisi 90 organisasi komunitas muslim Amerika yang bersatu dengan dimotori oleh Muslims Wellness Foundation dan Muslim Advocates itu menuntut polisi mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap orang kulit hitam.

"Kami jadi saksi momen yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat transformatif dalam sejarah. Di tengah pandemi global, banyak komunitas kulit hitam bergulat dengan rasa sakit, trauma, dan kesedihan yang ditimbulkan oleh momok rasialisme dan kekerasan antikulit hitam. Komitmen kami teguh dan kolektif terhadap keadilan, kewajiban kami sebagai Muslim untuk menentang ketidakadilan sistemik yang berkontribusi terhadap penderitaan ini," kata Direktur Eksekutif Muslim Wellness Foundation Kameelah Mu'Min Rashad.

Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Syukron Kamil menilai demonstrasi yang bergulir setelah kematian Floyd tidak hanya menunjukkan protes atas perlakuan polisi yang berujung pada penuntutan reformasi di tubuh kepolisian Amerika. Lebih dari itu, demonstrasi juga merupakan ungkapan penolakan terhadap rasialisme secara umum, terutama yang sering menimpa kaum kulit hitam, termasuk Muslim. Demonstrasi Muslim dari berbagai organisasi pun menjadi gambaran dukungan yang diberikan umat Islam dari ragam

ras terhadap rasialisme yang sering menimpa warga kulit hitam.

"Itu bagian dari dukungan Muslim kulit putih dan kulit berwarna kepada kalangan kulit hitam yang sering mendapat tindakan rasial," kata Syukron kepada *Republika*.

Syukron menjelaskan, rasialisme sudah sering menimpa warga kulit hitam di Amerika Serikat, termasuk di dalamnya adalah Muslim. Menurut Syukron, berdasarkan data Council on American Islamic Relation (CAIR), ada 14 ribu sampai 15 ribu kasus diskriminasi yang menimpa umat Islam di Amerika tak lama setelah peristiwa serangan 11 September 2001. Muslim perempuan yang paling sering menjadi korban rasialisme. Syukron juga mengatakan, kelompok Muslim di Amerika juga sering dituduh kalangan liberal sebagai kelompok sosial yang tak bisa menerima nilai-nilai Barat.

"Belakangan, ketakutan Muslim di AS atas tindakan rasialisme kulit putih berubah bentuk menjadi ketakutan terhadap kalangan ultranasionalis yang antipendatang dan anti-Islam," katanya.

Singkatnya, demonstrasi yang dilakukan Muslim bukan sekadar solidaritas terhadap kaum kulit hitam, tetapi juga menjadi luapan dari rasialisme dan diskriminasi yang sering dialami umat Islam, baik itu kulit hitam maupun kulit putih, di Amerika. "Hanya saja, saat (rasialisme dan diskriminasi) menimpa umat Islam (pada kasus-kasus) sebelumnya, dukungan dari non-Muslim tidak sebesar kasus Floyd karena bentuk rasialismenya adalah Islamofobia," kata dia.

■ ed: a syalaby ichsan



Belajar Antirasialisme dari Islam



Islam merupakan agama yang mengakomodasi demokrasi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan.

■ IMAS DAMAYANTI

Tindakan rasialisme amat ditentang oleh ajaran Islam. Perbedaan warna kulit, suku, dan bangsa tidak pernah 'dihitung' dalam agama penuntut ini. Ajaran Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW hadir dengan semangat merangkul perbedaan dan pandangan-pandangan pembauran yang asing pada masa itu. Hingga kini, nilai-nilai kesetaraan antarsesama manusia masih tetap menjadi pegangan.

Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) KH Mohammad Siddiq menjelaskan, dalam sejarahnya, Islam hadir dengan pandangan yang sangat moderat. Dia menceritakan bagaimana sahabat Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah, dimulikan. Bilal merupakan sahabat Nabi

yang berasal dari suku berkulit hitam dari Habsyah (sekarang Etiopia). Karena tidak memiliki keluarga, lumrah pada masa itu seseorang kerap dijadikan budak. Hal serupa pun dialami Bilal. Namun, setelah majikannya mengetahui Bilal memeluk Islam, ia pun disiksa terus-menerus.

Keteguhan hati Bilal ini pada akhirnya mengetuk hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Khalifah pertama dalam Islam ini pun akhirnya memerdekakan Bilal dari perbudakan. Berdasarkan kisah tersebut, kata KH Muhammad Siddiq, Islam telah membuktikan agama tidaklah memandang seseorang berdasar suku, bangsa, apalagi warna kulit seseorang. "Apalagi (memandang) dari warna kulitnya, Islam tidak pernah menyuarakan hal seperti itu. Dalam Islam, semua manusia di mata Allah itu sama," kata KH Mohammad Siddiq saat dihubungi *Republika*, Rabu (17/6).

Dia melanjutkan, sebagaimana termak-

tub dalam Alquran surah al-Isra ayat 70 berbunyi: "Wa laqad karamna Bani Adama, wa hamalanahum fil-barri wal-bahri, wa razaqnahum minatthayyibi wa faddhalnahum ala katsirin min man khalafina taqdiran". Yang artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami mulikan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

Menurut dia, sejatinya seluruh anak-anak keturunan Nabi Adam telah dimulikan. Islam tidak membedakan apa pun yang berasal dari latar belakang seseorang. Meski dipandang setara, di mata Allah manusia dapat terlihat berbeda tergantung bagaimana taraf keimanannya kepada Tuhan.

Allah berfirman dalam Alquran surah al-Hajarat ayat 13 berbunyi: "Ya ayyuhan-nasu innu khalqaqakum min dzalzar wa unsta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi at-qakum innallaha alimun khabir". Yang artinya: "Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui".

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan, Islam merupakan agama yang mengakomodasi demokrasi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan. Demokrasi dinilai merupakan upaya untuk mengakomodasi berbagai suara dari beragam kalangan. "Sehingga, dalam Islam, segala perbedaan itu dapat diakomodasi bersama. Inilah ajaran Islam, mengombinasikan perbedaan untuk persatuan dan kemanusiaan," ujarnya.

Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Syaiful Hidayat mengatakan, cetak biru yang diciptakan Allah merupakan kodrat dari manusia. Artinya, perbedaan atas bentuk lahiriah dan perbedaan yang ada dari cetak biru tersebut merupakan hal yang harus diterima. Adanya perbedaan, baik dari sisi budaya, bahasa, maupun warna kulit menurut beliau dimaksudkan untuk terciptanya integrasi atau saling mengenal. "Perbedaan dalam Islam itu menjadi sintesis kreatif bisa menjadi produktivitas hidup, jadi (perbedaan) bukan untuk mengarakkan manusia pada konflik," ungkapnya.

Di sisi Allah, lanjut dia, semua manusia dianggap sama. Yang berbeda hanyalah sisi keimanan dan ketakwaan manusia itu sendiri terhadap Tuhannya.

■ edo @ soplaby@tchsn



Islam tidak pernah menyuarakan hal seperti itu. Dalam Islam, semua manusia di mata Allah itu sama.